



GAPKI NEWS

Edisi 02, Januari 2024

Optimistis Menjalani Ketidakpastian Global 2024



Pembaca yang budiman,

Tidak ada yang patut kita ungkapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengawali tahun 2024 ini. Kami Redaksi Buletin GAPKI News mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga tahun yang penuh tantangan ini menjadikan kita semua semakin kuat, semakin teguh, dan semakin solid dalam berorganisasi. Kita juga berharap program-program kerja GAPKI dapat terlaksana semaksimal mungkin dan industri kelapa sawit nasional tumbuh berkembang sehingga menjadi kontributor penting perekonomian nasional.

Pada penerbitan GAPKI News edisi Januari 2024 ini, ada beragam program kerja organisasi yang menjadi topik media kita tercinta ini. IPOC 2023 sebagai hajat tahunan GAPKI berskala global dapat terlaksana dengan lancar. Fokus pembahasan dalam IPOC 2023 dan prediksi harga CPO global tahun 2024 menjadi poin utama yang kami sajikan dalam buletin ini. Termasuk tentang tantangan besar industri kelapa sawit nasional dalam menghadapi ketidakpastian pasar global. Artikel tentang IPOC 2023 diharapkan dapat menjadi suntikan semangat untuk kita semua.

IPOC 2023 dengan segala dinamikanya adalah puncak kegiatan GAPKI sepanjang 2023. Beragam peristiwa mengiringi perjalanan *event* tahunan ini. Selain *event* IPOC 2023 itu sendiri, yang tidak kalah seru tentu bagaimana mengelola komunikasi dan publikasinya. Ada 30 media dari Jakarta, plus 5 media daerah sentra sawit serta media internasional yang meliputi *event* ini. Hasilnya tidak kurang dari 500 berita tentang IPOC 2023 tersebar di media lokal, nasional, dan internasional. Suatu pencapaian yang layak diapresiasi.

Topik lain yang tidak kalah menarik adalah komitmen GAPKI terhadap pekerja di sektor sawit yang menjadi salah satu bahasan GAPKI News edisi Januari 2024 ini. Pada edisi kedua ini kami memotret sejarah beberapa GAPKI Cabang sebagai dokumentasi dan publikasi organisasi. Dari 15 GAPKI Cabang di seluruh Indonesia, memang belum semua terpublikasi sekarang. Namun, pada edisi berikutnya GAPKI Cabang lain tentu mendapat giliran yang sama. Karena itu, kami berharap dukungan GAPKI Cabang dapat mengirimkan materi.

Tema lain tentunya tidak mungkin kami paparkan di sini. Kami berharap sajian edisi kedua ini dapat menambah *spirit* dan kebersamaan kita dalam berorganisasi. Terima kasih.

Salam,
Redaksi GAPKINews

GAPKINews

Media Komunikasi dan
Informasi Anggota GAPKI

PENERBIT

GAPKI Pusat

PEMBINA

Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

PENGARAH

Mukti Sardjono

TIM AHLI

Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

PENANGGUNG JAWAB

Fenny Sofyan

Dewan Redaksi

Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Ratri Melanda Maharani
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

ALAMAT

Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@
yahoo.com

8,9 Oil Palm Marathon 2023 Sukses Digelar di Sumatera Utara



2 Salam Redaksi

3 Daftar Isi

4,5 Optimistis Menjalani Ketidakpastian Global 2024

6,7 Yang Terbaik untuk Perusahaan dan Organisasi

10 Inspirasi: Sany Anthony

12 Edukasi Jaminan Sosial di Sektor Perkebunan Sawit

14 GAPKI dan Polri Sepakati Peningkatan Sistem Pengamanan

15 Mentan Minta GAPKI Sukseskan Swasembada Pangan

16 Inspirasi: Susanto

17 Media Handling, Kunci Sukses Publikasi IPOC 2023



11 GAPKI Salurkan CSR Ekonomi Solutif di Papua



13 Partisipasi GAPKI di Trade Expo Indonesia ke-38



21 WWF dan Pebisnis India Studi Banding Sawit ke GAPKI



25 JAGA SAWITAN jadi Percontohan di RDA 2023



29 Membangun Sinergi dan Soliditas Organisasi



30 Membangun Superteam, Bukan Superman

32 Mengembangkan Anggota, Menebar Manfaat

33 Inovasi dan Riset Sawit Berkelanjutan

34 Memperkuat Sinergi Membangun Kalimantan Barat

35 Menjadi Lokomotif Kemajuan Ekonomi Daerah

36 Gapki Cabang Papua dengan Usia Paling Muda

37 Bersinergi Mengembalikan dan Soliditas Organisasi

18 GAPKI Beri Masukan Penguatan Permentan NO. 1 Tahun 2018

19 Memperkuat Sekretariat, Menggapai tujuan Organisasi

20 GAPKI Dukung UKMK Sawit Go International

22 Inspirasi: Mona Surya

23 Komitmen dan Kontribusi GAPKI dalam Percepatan ISPO

24 7 Rekomendasi GAPKI Sumut dalam IPOS Forum 2023

26 Borneo Forum VI Fokus Tiga Solusi

27 Mandat ESG, Antara Kendala dan Kesempatan

28 Inspirasi: Satrija B. Wibawa

31 Mengutamakan Semangat Kebersamaan

Optimistis Menjalani KETIDAKPASTIAN GLOBAL 2024



“Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, industri sawit dapat tumbuh dengan mantap di tengah dinamika pasar dan perekonomian,” kata Eddy Martono.

Event 19th Indonesian Palm Oil Conference 2023 & 2024 Price Outlook sukses diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 1-3 November 2023. Hajatan internasional yang lebih dikenal sebagai IPOC ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri lebih dari 1.500 peserta dari 23 negara. Ada 43 perusahaan sponsor yang menjadi indikator bahwa IPOC adalah magnet bagi pelaku bisnis. Dalam pidatonya Menko Airlangga Hartarto membahas ketahanan industri sawit di tengah ketidakpastian dan kebijakan EUDR.

Pemaparan Menko Airlangga Hartarto dilanjutkan pemaparan secara daring oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang

mengingatkan perlunya kolaborasi pemangku kepentingan untuk memajukan industri sawit Indonesia. “Saya berharap posisi strategis industri sawit dapat dipertahankan, berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani,” katanya.

Dengan mengangkat tema Enhancing Resiliency Amid Market Uncertainty, IPOC yang digelar rutin setiap tahun oleh GAPKI ini memotret industri sawit sepanjang 2023 untuk mengantisipasi situasi 2024. Karena itu, IPOC 2023 berfokus pada tantangan dan peluang industri sawit tahun 2024 yang diprediksi penuh ketidakpastian. “Tema ini relevan karena dinamika perekonomian dunia yang terus dilanda ketidakpastian,”

kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam sambutan pembukaan IPOC 2023. Eddy Martono menjelaskan bahwa ketidakstabilan harga minyak sawit dan produktivitas yang stagnan menjadi faktor lain yang mengindikasikan ketidakpastian perdagangan global sehingga ketahanan dunia usaha perlu ditingkatkan. Perang Rusia-Ukraina yang tidak kunjung usai akan berdampak terhadap pasokan pangan dan energi global. Sebab, Ukraina adalah produsen biji-bijian seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Kondisi ini yang harus diwaspadai oleh dunia usaha sejak dini.

Kondisi ini semakin diperparah oleh kebijakan Uni Eropa yang mengesahkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada 16 Mei 2023. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada peningkatan harga produksi, tapi juga menyingkirkan petani kelapa sawit dari rantai pasok. “Kebijakan EUDR

akan berdampak pada tiga juta petani sawit di seluruh dunia,” kata Rizal Afandi Lukman, Sekjen CPOPC (Council of Palm oil Producing Countries), salah satu pembicara IPOC 2023. Ada kesenjangan lebar antara EUDR dan kondisi petani di lapangan.

Untuk itu, CPOC membentuk Joint Task Force dengan Uni Eropa guna menjembatani regulasi EUDR dengan kondisi petani sawit dunia. Salah satu kegiatannya yakni melalui smallholder workshop di Malaka. Keberatan Indonesia terkait EUDR tidak dilandasi oleh sikap penolakan pada konsep keberlanjutan. Sebab, Indonesia telah melawan deforestasi sejak lama dan dalam empat tahun terakhir laju deforestasi Indonesia telah mengalami

penurunan.

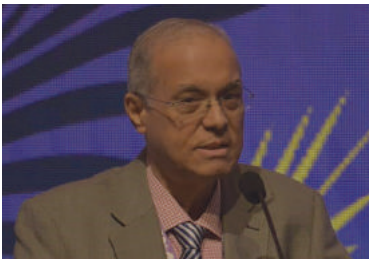
Konferensi selama dua hari ini membahas masalah dari beragam sudut pandang untuk memberi gambaran yang lebih utuh tentang prospek bisnis sawit ke depan. Namun, proyeksi harga CPO ke depan menjadi momentum yang paling ditunggu. “Proyeksi harga CPO ini menjadi referensi bagi industri di tahun 2024,” kata Mona Surya, Ketua Panitia IPOC 2023. Karena itu, analisis dari pakar di bidang industri minyak nabati dunia seperti panduan bagi pelaku industri.

Proyeksi harga ini bukan sekadar panduan, namun juga spirit bagi pelaku industri sawit untuk menjalani 2024. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono menyatakan para pelaku usaha sawit

tetap optimistis menyambut peluang pada 2024. GAPKI berharap pemerintah mengambil langkah bijak untuk menjaga daya saing industri kelapa sawit Indonesia dengan memperkuat produksi minyak sawit berkelanjutan. “Beberapa langkah yang dapat diambil adalah melalui program *replanting* dan penggunaan energi terbarukan melalui *bioavtur*,” katanya.

Kebijakan pemerintah yang tepat menjadi energi tambahan bagi industri sawit membangun ketahanan menghadapi ketidakpastian global. “Dengan kebijakan pemerintah yang tepat, industri sawit dapat tumbuh dengan mantap di tengah dinamika pasar dan perekonomian,” kata Eddy Martono. ■

Penentu Harga Minyak Nabati Dunia



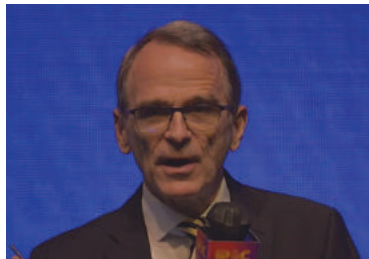
DORAB MISTRY

Direktur Godrej Internasional

Secara makro harga minyak nabati tahun 2024 dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga The Fed, kemungkinan resesi 2024, berakhirnya perang di Ukraina dan Gaza, serta perkembangan harga dolar Amerika. Tapi, jumlah pasokan minyak nabati di tengah El Nino, mandatori biofuel di Indonesia dan negara lainnya serta pertimbangan kandidat Presiden AS terkait subsidi lebih besar untuk biofuel akan sangat menentukan besarnya kebutuhan minyak nabati global.

Indonesia menjadi titik sentral karena menjadi produsen sekaligus konsumen, serta eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Indonesia akan memainkan peran besar dalam menentukan harga. Karena itu, reaksi Indonesia terhadap kondisi pasar menjadi sangat penting.

Tingkatkan Yield per Hektar



THOMAS MIELKE

Peneliti minyak nabati di Oil World

Produksi CPO dunia akan turun dalam 10 tahun ke depan dengan rata-rata 1,7 juta ton per tahun hingga 2030. Padahal konsumsi minyak nabati global dalam 10 tahun belakangan ini naik untuk kebutuhan makanan, energi dan oleokimia. Akan terjadi defisit produksi global pada 2024 sehingga harga minyak nabati naik.

Sebagai penyumbang 54% ekspor CPO dunia, penurunan produksi CPO di Indonesia yang berdampak pada penurunan ekspor sampai dua tahun ke depan akan menyebabkan daya saing minyak nabati di pasar global memburuk.

Apabila Indonesia ingin tetap menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, maka harus meningkatkan yield per hektar di tengah keterbatasan lahan.

Fokus Pendanaan Program PSR



NAGARAJ MEDA

CEO dan Founder Transgraph

Kebijakan Indonesia melanjutkan implementasi biodiesel B35 dan ditingkatkan menjadi B40 pada 2024 akan meningkatkan konsumsi minyak sawit hingga 12,45 juta metrik ton dan peningkatan investasi terhadap energi terbarukan.

Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap minyak nabati dunia selain karena faktor konsumsi Amerika yang naik.

Di tengah kecenderungan produksi minyak sawit yang menurun, pemerintah Indonesia harus memikirkan kembali rencana implementasi B40.

Indonesia perlu lebih berfokus pada pendanaan program peremajaan kebun sawit untuk meningkatkan produksi nasional.

Yang Terbaik untuk **PERUSAHAAN DAN ORGANISASI**

“Investasikan semua waktu dan sumberdaya terbaik untuk meraih kinerja maksimal di atas rata-rata,” katanya soal resep membangun karir.



Kita lebih mengenalnya sebagai Hadi Sugeng. Panggilannya Pak Hadi atau Pak Sugeng. Padahal, nama lengkapnya cukup panjang. Muhammad Hadi Sugeng Wahyudiono. Sekarang, Pak Hadi menjabat Sekretaris Jenderal GAPKI, amanah yang diembannya sejak 2023. GAPKI tentu bukan organisasi yang asing bagi dirinya. Bergabung di Kompartemen Riset dan Pengembangan sejak 2017, tugas utamanya berhubungan dengan inovasi untuk pengembangan organisasi. Tugas ini sejalan dengan perannya sebagai Chief Agronomy and Sustainability Officer Astra Agro Lestari.

Beberapa riset terapan di Astra Agro seperti digitalisasi hingga mekanisasi di kebun sawit itu ia sampaikan ke GAPKI. Jumlahnya lumayan banyak. Selain riset, program Klinik ISPO untuk GAPKI juga tidak lepas dari perannya di organisasi ini. “Kita bersyukur manfaat Klinik ISPO dirasakan langsung oleh anggota GAPKI,” kata Sarjana Ilmu Tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Jember ini. Meskipun sosialisasi Klinik ISPO baru untuk 11 GAPKI Cabang di tahun 2019, namun pencapaian penerapan ISPO untuk anggota GAPKI melonjak tajam.

Kunci keberhasilan Klinik ISPO adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyiasati kesibukan anggota GAPKI. Selain itu, pelaporan terkait ISPO juga disederhanakan melalui GISTA (GAPKI ISPO Support Application). Hasilnya sangat positif bagi organisasi. GAPKI menjadi pihak pertama yang mendapatkan update tentang ISPO terbaru pada 2020. “Ini salah satu kekuatan kita kenapa ISPO akhirnya bisa landing,” kata lelaki yang memulai karir sebagai Asisten Kebun di anak perusahaan PT Astra Agro Lestari, Tbk pada 1994 ini.

Pak Hadi punya prinsip pada setiap tugas yang diembannya. “Totalitas dalam bekerja,” katanya. Ia senang dengan hal-hal baru sehingga selalu terdorong mencari terobosan. Termasuk ketika diberi amanah sebagai Sekjen GAPKI. Ia berfokus pada peningkatan tata kelola sebagai aspek fundamental organisasi. “GAPKI ini organisasi besar sehingga urusan tata kelola sudah harus beres,” kata lelaki yang punya passion pada makhluk hidup dan tumbuhan ini. Prinsip ini yang turut mengantar karirnya dari nol hingga level Direksi.

Pria kelahiran Lamongan, 19 Mei 1968 ini merasa bersyukur karena telah melewati semua level jabatan di kebun.

“GAPKI ini organisasi besar sehingga urusan tata kelola sudah harus beres.”

Karirnya lengkap setelah ditugaskan di function sebagai Chief Agronomy and Sustainability Officer Astra Agro Lestari pada 2017. “Investasikan semua waktu dan sumberdaya terbaik untuk meraih kinerja maksimal di atas rata-rata,” katanya soal resep membangun karir. Karena itu, harus paham detail pekerjaan dan siap bekerja dalam tim. Apalagi untuk memimpin area kebun yang padat karya sekaligus padat modal.

Sebagai Insan Astra Agro, Pak Hadi berfokus mengembangkan empat dari 8 Kompetensi Astra di awal karirnya yakni Interpersonal Skill; Leading & Motivating; Teamwork; dan Drive, Courage, Integrity. Empat kompetensi lain berkembang sejalan dengan tanggung jawab yang dia terima. “Saya jalani setiap proses ini tanpa mengeluh dan tidak hitungan-hitungan soal waktu,” kata pria yang gemar naik gunung ini.

Spirit tanpa keluhan dan hitungan waktu itu yang sekarang ia jalankan ketika dipercaya menjadi Sekjen GAPKI. Kolaborasinya dengan Direktur Eksekutif GAPKI adalah salah satu cara tetap aktif dalam kegiatan organisasi ketika ada tugas perusahaan yang tidak dapat ditinggal. “Dengan cara ini kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan maupun organisasi,” katanya. ■



M. HADI SUGENG

Oil Palm Marathon 2023 SUKSES DIGELAR DI SUMATERA UTARA



Dengan mengangkat tema Run for Sustainability Palm Oil 2023, lomba lari maraton ini terbagi dalam empat kelompok.

Kampanye positif komoditas sawit dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan mulai eksibisi memasak dan kuliner, pameran produk berbasis sawit kreasi UMKM, sampai event olahraga. Dari berbagai kegiatan yang pernah digelar, Oil Palm Marathon tergolong yang menyita banyak perhatian. Apalagi lomba lari maraton di area perkebunan kelapa sawit ini hanya ada di Indonesia, negeri penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

GAPKI Sumut untuk ketiga kali sukses menggelar Oil Palm Marathon

Event ini merupakan yang ketiga di Sumatera Utara dan semakin banyak diikuti pelari, bahkan dari luar negeri. Itu membanggakan.

pada 25 November 2023 di area kebun PT Socfin Indonesia di Kebun Bangun Bandar, Dolok Masihul, Sumatera Utara. Dua event sebelumnya juga di

Sumatera Utara pada 2019 dan 2022. Dengan mengangkat tema Run for Sustainability Palm Oil 2023, lomba lari maraton ini terbagi dalam empat kelompok yakni Full Marathon 42 km, Half Marathon 21 km, 10 km, dan 5 km. Sebanyak 1.200 pelari dari dalam dan luar negeri seperti Kenya dan Malaysia ambil bagian dalam event ini.

“Event ini merupakan yang ketiga di Sumatera Utara dan semakin banyak diikuti pelari, bahkan dari luar negeri. Itu membanggakan,” kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono yang juga ambil bagian sebagai salah satu peserta lomba. Event olahraga

tahunan besutan GAPKI ini diadakan pada 2020 dan 2021 karena pandemi Covid-19.

Lomba lari maraton di kebun sawit ini menjadi kampanye positif untuk mendukung program kebun sawit berkelanjutan. Dengan lomba ini, masyarakat semakin dapat melihat kondisi yang sebenarnya di perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain, pengenalan tanaman sawit kepada publik akan terus dilakukan dengan beragam agenda.

Menurut Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting, dengan adanya lomba ini masyarakat akan semakin mengenal tanaman sawit. Misalnya, sawit adalah tanaman yang dapat ditanam 3-5 kali daur ulang (replanting) tanpa merusak lingkungan, khususnya tanah dan sumber airnya. "Ini penting untuk diketahui masyarakat," katanya. Karena itu, kebun sawit bukan penyebab pemanasan global.

Lomba lari maraton tingkat internasional ini menjadi berkah bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya dan Wakil Bupati, Adlin Tambunan yang mengikuti lomba ini memberikan apresiasi positif. "Ini ajang promosi positif bagi kabupaten Serdang Bedagai," katanya. Kegiatan ini cukup positif untuk mengedukasi masyarakat tentang sawit dan olahraga lari. "Termasuk untuk mempromosikan produk UMKM di sini," katanya. ■



”Hidup tidak selalu indah, Jika kamu merasa ingin menyerah, ingatlah mengapa kamu memulainya.”

SANY ANTHONY

Wakil Ketua Umum | GAPKI

GAPKI Salurkan CSR EKONOMI SOLUTIF DI PAPUA

Protein hewani sangat dibutuhkan masyarakat Papua. Namun, sejauh ini kebutuhan tersebut masih didatangkan dari provinsi lain.



GAPKI menyalurkan CSR berupa bantuan usaha ikan bandeng, lele, ayam petelur dan sepeda motor kepada masyarakat Papua melalui beberapa yayasan pada 19 Desember 2023. “Ketiga komoditi ini penghasil protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di Jayapura. Bantuan ini diharapkan meningkatkan kegiatan produktif dan ekonomi serta meningkatkan ketersediaan protein yang dibutuhkan masyarakat.

Bantuan yang diberikan terdiri dari 5.000 ekor benih ikan lele pakan kepada Pesantren Latifa Mubarakah Arso 4 dan 5.000 benih ikan bandeng beserta pakan kepada Pesantren Hidayatullah Holtekam. Sedangkan CSR ternak ayam diberikan dalam bentuk kandang dan bibit ayam petelur masing-masing 1.000 ekor kepada Pesantren Nurul Anwar Sentani dan Yayasan Laskar Kristus (Panti Asuhan Kanaan Jaya). GAPKI juga memberikan satu sepeda motor.

Menurut Eddy Martono, protein hewani sangat dibutuhkan masyarakat Papua. Namun, sejauh ini kebutuhan tersebut masih didatangkan dari

provinsi lain, terutama komoditas telur, lele dan bandeng. Dengan bantuan ini diharapkan ketersediaan protein dapat terpenuhi sekaligus untuk merealisasikan komitmen GAPKI dalam pemberdayaan masyarakat Papua.

Penyerahan bantuan GAPKI ini dihadiri Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Provinsi Papua yang mewakili Gubernur Provinsi Papua, pengurus GAPKI Pusat dan GAPKI Papua, pengurus Yayasan Laskar Kristus Kampung Dosay, pengurus Pesantren Hidayatullah Holtekam, pengurus Pesantren Latifa Mubarakah Arso 4, dan pengurus Pesantren Nurul Anwar Sentasi.

Ketua Yayasan Laskar Kristus menyampaikan ormat atas kepada GAPKI yang membantu anak-anak dari wilayah konflik di Papua. Adapun Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Provinsi Papua Karel Yarangga yang mewakili Gubernur Papua berharap kerjasama dengan GAPKI dan pemerintah setempat dalam mengedukasi komoditas sawit terus berlanjut. “Reputasi sawit di Papua harus ditingkatkan karena Papua layak dikelola untuk investasi,” kata Karel Yarangga. ■



Edukasi Jaminan Sosial DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT



“Jaminan sosial ketenagakerjaan bisa menjadi bantalan utama untuk mencegah pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru,”

Jaminan sosial adalah salah satu fasilitas untuk membuat pekerja merasa tenang dan nyaman dalam bekerja. Pemahaman mereka tentang fasilitas ini perlu ditingkatkan melalui edukasi rutin seperti yang dilakukan oleh GAPKI dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dua entitas ini mengunjungi Asian Agri Group di Medan dan lahan perkebunan PT Karya Hevea Indonesia di Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kunjungan pada 22 Juni 2023 ini menjadi bagian dari kerjasama GAPKI dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang terjalin sejak Januari 2020.

Dalam kunjungan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM Sumarjono Saragih dan Ketua Kompartemen Regulasi Pengupahan Immanuel Manurung. Adapun BPJS TK diwakili oleh Budi Jatmiko, Asdep Kepesertaan BPJS TK Pusat, Awalul Rizal Wakil Ketua Kanwil Bidang Kepesertaan BPJS TK Sumbagut.

“Edukasi ini untuk mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja anggota GAPKI,” kata

Edukasi ini untuk mengoptimalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja anggota GAPKI

Sumarjono Saragih.

Asian Agri Group mendapatkan apresiasi atas kepatuhan membayar iuran kepesertaan pekerja. Kelompok usaha ini diusulkan menerima Paritrana Award, apresiasi pemerintah kepada pelaku usaha yang mendukung penuh implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Kami akan terus berkomitmen memberikan jaminan sosial bagi pekerja,” kata Mariadi selaku Head Operational HR Asian Agri Wilayah Sumatera Utara.

Selain kunjungan ke perusahaan, GAPKI Cabang Sumatera Utara juga mengadakan kunjungan ke Kanwil

BPJS TK Sumbagut di Medan pada 19 September 2023.

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua GAPKI Sumut, Timbas Prasad Ginting yang didampingi oleh Wakil Ketua Mino Lesmana, Sekretaris Syahril Pane, dan Ketua Kompartemen Ketenagakerjaan Gerry Hervinta. Adapun BPJS TK diwakili oleh Wakil Kepala Kanwil BPJS TK Sumut Sanco Simanullang. BPJS TK menyatakan siap memfasilitasi workshop tentang ketenagakerjaan yang diadakan GAPKI Sumut.

Menurut Timbas Prasad, BPJS TK siap terjun ke lapangan untuk mendorong kepesertaan para pekerja di rantai pasok sawit. Hal ini sejalan dengan Gerakan Nasional Peduli Pekerja Rentan (GN Lingkar) melalui penyaluran dana CSR sebagai kepada masyarakat pekerja rentan di sekitar lingkungan perusahaan.

“Jaminan sosial ketenagakerjaan ini bisa menjadi bantalan utama untuk mencegah pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru,” katanya. Karena itu, kolaborasi GAPKI dan BPJS TK sangat penting untuk menjamin para pekerja. ■

Partisipasi GAPKI DI TRADE EXPO INDONESIA KE-38

Buyer yang berminat dengan produk yang dipamerkan akan dihubungkan dengan produsen yang juga anggota GAPKI.



GAPKI berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia ke-23 yang berlangsung pada 18-22 Oktober 2023 di Indonesia Convention Exhibition BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Dalam pameran ini, GAPKI tidak berdiri sendiri, tapi bergabung dalam booth BDPKS bersama asosiasi sawit lain seperti APROBI, MAKSI, dan tiga perusahaan UMKM yakni SBFC (Surfactant & Bioenergi Research Centre), PT Material Data Space (MDS) dan Pondok Pesantren Al Amin dari Dumai.

Trade Expo Indonesia (TEI) adalah *event* tahunan yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengenalkan brand berkualitas dari Indonesia ke mancanegara. TEI 2023 mengangkat topik Sustainable Trade for Global Economic Resilience. Produk yang dipamerkan dibagi dalam 7 zona yakni food & beverages, home living, digital & services, beauty & personal care, chemical, energy &

**Trade Expo Indonesia
adalah event
bergensi karena
diminati oleh
6.000 buyers lebih
dari 150 negara.**

industrial product, medical equipment & healthcare, fashion, dan textile & accessories.

Di *event* ini GAPKI menampilkan contoh produk turunan sawit, sample TBS dan publikasi yang diproduksi GAPKI sebagai sarana kampanye positif dan edukasi publik tentang sawit. Sekretariat GAPKI di booth BDPKS diperkuat oleh dua tim dari Wilmar Group untuk membantu menjawab dan memenuhi kebutuhan pengunjung. Promosi GAPKI di arena ini cukup menarik perhatian karena banyak permintaan untuk bertemu

dengan produsen produk yang dipamerkan.

Yang tidak kalah menarik, beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat seperti Srilanka, Tanzania, Uzbekistan, Pakistan, Inggris, Brasil, dan Rusia menggelar diskusi dengan pengurus GAPKI di booth BDPKS. Dalam *event* ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Wakil Ketua Umum Sany Anthony, Wasekjen Lolita Bangun, Ketua Bidang Kampanye Positif Agam Fatchurrochman, Bidang PSR Muhammad Iqbal menemani tamu untuk memberikan informasi yang mereka butuhkan.

Trade Expo Indonesia adalah *event* bergensi karena diminati oleh 6.000 buyers lebih dari 150 negara. Termasuk di dalamnya buyer yang berminat dengan produk turunan minyak kelapa sawit. Pameran ini tentu bermanfaat untuk anggota GAPKI karena buyer yang berminat dengan produk yang dipamerkan akan dihubungkan dengan produsen yang juga anggota GAPKI. ■

Mabes Polri menyambut positif dan menyepakati rencana GAPKI untuk menjalin kerjasama peningkatan sistem pengamanan dan penegakan hukum operasional.

Dalam rangka merawat hubungan yang sudah terjalin dan meningkatkan sistem pengamanan perkebunan kelapa sawit di berbagai daerah, GAPKI mengadakan audiensi dengan Asisten Operasi Kapolri, Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca yang didampingi oleh Kepala Biro Kerjasama Kementerian/Lembaga Mabes Polri Brigjen Dedy Setiabudi. Selain meningkatkan pengamanan, audiensi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum operasional terhadap para pelanggar di area perkebunan kelapa sawit.

Dalam pertemuan ini GAPKI mengusulkan peningkatan kerjasama seperti yang telah terjalin pada 2017.

Audiensi di Markas Besar Polri pada 7 November 2023 ini diikuti oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Wakil Ketua Umum III Satrija B Wibawa, Direktur Eksekutif Mukti Sardjono, Ketua Bidang Hubungan Pemerintah & Antar Lembaga Arief Susanto.

Di depan jajaran perwira Polri, Ketua Umum GAPKI menjelaskan peran strategis komoditas kelapa sawit dalam perekonomian negara, terutama dalam perolehan devisa. "Sektor sawit juga menyerap jutaan tenaga kerja," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

Selain itu, sektor sawit termasuk sektor yang berperan besar menyelamatkan perekonomian negara ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada 2020-2021. "Industri sawit bertahan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja," katanya. Dengan kontribusi ini, komoditas sawit memerlukan sistem pengamanan yang lebih baik lagi. Apalagi beberapa tindakan

GAPKI dan Polri Sepakati PENINGKATAN SISTEM PENGAMANAN



kriminal pada sektor sawit di beberapa daerah mulai mengarah pada anarki. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya sangat besar terutama keamanan dan kenyamanan investasi.

Dalam pertemuan ini GAPKI mengusulkan peningkatan kerjasama seperti yang telah terjalin pada 2017. Saat itu, GAPKI menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabarhakam) Komjen Putut Bayu Seno pada 7 November 2017. Nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan kerjasama konkret ini disosialisasikan ke Polda-Polda di seluruh Indonesia.

Mabes Polri menyambut positif dan menyepakati rencana GAPKI untuk menjalin kerjasama peningkatan sistem pengamanan dan penegakan hukum operasional.

Pembahasan draft nota kesepahaman akan dilakukan bersama oleh kedua pihak. Pembahasan draft akan dikoordinasi



oleh Kepala Biro Kerjasama dan Kepala Biro Hubungan Kementerian/Lembaga serta Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono. ■

Mentan Minta GAPKI SUKSESKAN SWASEMBADA PANGAN

Salah satunya adalah optimalisasi lahan melalui program kelapa sawit tumpang sari tanaman pangan atau Kesatria.



Sejak dilantik sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprioritaskan program swasembada pangan dengan meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai. Prioritas ini ditetapkan karena Indonesia masih mengimpor 3,5 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Karena itu, sektor yang dapat mendukung swasembada didorong agar bersinergi. Salah satunya adalah optimalisasi lahan melalui program kelapa sawit tumpang sari tanaman pangan atau Kesatria.

Untuk sosialisasi program ini, Menteri Pertanian mengundang pemangku kepentingan untuk mendukung program swasembada. Dalam pertemuan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat dan Ketua Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR Muhammad Iqbal. Pertemuan di Auditorium Kementan pada 15 November 2023 itu dihadiri juga oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Dirjen Perkebunan, Dirjen Tanaman Pangan, pejabat

**Menteri Pertanian
Andi Amran
Sulaiman
menegaskan
akan mendorong
penyelesaian
proses pelepasan
lahan dalam
kawasan hutan.**

fungsional penyuluh pertanian, dan pejabat fungsional Ditjen PSP.

Dalam pemaparannya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan swasembada pangan harus dilakukan karena stok pangan berkurang dan harus impor. "Karena itu, GAPKI diharapkan mendukung swasembada pangan ini melalui program Kesatria," katanya. Di sisi lain, Mentan juga meminta Direktur Jenderal Perkebunan untuk menghimpun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha seperti pengaturan pembelian harga tandan

buah segar (TBS) pekebun swadaya yang perlu diprioritaskan. "Jangan sampai ada yang dirugikan," katanya.

Untuk mendorong program Kesatria, Kementan akan menyiapkan bantuan untuk para petani yang menanam padi, jagung dan kedelai. Bantuan tahun 2023 diberikan untuk pengembangan lahan kering area perkebunan di Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Belitung. Sedangkan bantuan hortikultura untuk 2024 dialokasikan untuk Sorong, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung. Kementan juga memberi bantuan benih untuk perusahaan.

Partisipasi perusahaan perkebunan bisa dilakukan dalam bentuk program CSR bagi petani yang mengikuti program Kesatria. Selain CSR, perusahaan dapat menjalankan bantuan ini melalui pemenuhan kewajiban FPKM 20%. Terkait dengan masalah yang dihadapi pelaku usaha sawit saat ini yakni, dugaan kebun sawit terlanjur masuk kawasan hutan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mendorong penyelesaian proses pelepasan lahan dalam kawasan hutan. ■

”Kita lakukan yang terbaik untuk GAPKI dan untuk sawit indonesia, bekerja dengan ikhlas dan penuh syukur.”

SUSANTO

Wakil Ketua Umum II GAPKI



Media Handling, KUNCI SUKSES PUBLIKASI IPOC 2023

KOMUNIKASI

Lebih dari 500 berita terkait IPOC 2023 terbit di media lokal, nasional, dan internasional dalam berbagai bahasa.



Sebagai hajatan internasional dengan ribuan peserta dari dalam dan luar negeri, publikasi 19th IPOC 2023 & 2024 Price Outlook membutuhkan penanganan berbeda. Tidak sama dengan event lain karena dampak hajat tahunan GAPKI ini terhadap industri sawit nasional dan global cukup signifikan. Karena itu, perencanaan, persiapan, dan pengelolaan media (media handling) harus tersusun dengan baik. Tentu saja media handling ini menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Komunikasi IPOC 2023.

Untuk kepentingan publikasi IPOC 2023 yang berlangsung pada 1-2 November 2023, sebanyak 30 wartawan dari Jakarta diterbangkan ke Nusa Dua, Bali. Selain mereka, lima wartawan dari daerah sentra kelapa sawit di Indonesia juga didatangkan ke Bali. Tidak lama setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai, mereka diajak mengunjungi Pura Luhur Uluwatu yang terletak 97 meter di atas permukaan laut. Rehat sejenak di area cagar budaya ini, Tari Kecak dengan 50 penari jadi sajian yang menyegarkan mata, hati, dan jiwa.

Sambutan untuk media tidak hanya dengan seni budaya. Di tepian pantai Jimbaran yang dikenal sebagai surga makanan laut, Wakil Ketua Umum III GAPKI Satrija B. Wibawa, Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng, dan Direktur Eksekutif GAPKI



Mukti Sardjono menyambut mereka. Makan malam dan ramah tamah yang dilanjutkan dengan diskusi berbagai topik tentang kelapa sawit membuat malam di Jimbaran semakin nikmat. Topik serius dibahas dengan selingan canda dan tawa dalam suasana riang gembira.

Diskusi tentang industri kelapa sawit terkini di Jimbaran itu seperti pengantar bagi wartawan yang akan meliput IPOC 2023 yang berlangsung keesokan harinya. Dengan bekal informasi awal dan pengetahuan materi yang dibahas di arena IPOC 2023. Materi pidato pembuka IPOC 2023 oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan segera berpindah menjadi berita tidak lama setelah pemaparan secara virtual dua menteri itu rampung.

Untuk mendukung kerja media, Tim Komunikasi IPOC 2023 menyediakan press room dengan perangkat pendukungnya. Tim Komunikasi IPOC mengajak beberapa pengurus GAPKI datang ke press room untuk bersilaturahmi sekaligus berbagi informasi. Pengelolaan media yang baik ini menghasilkan publikasi IPOC 2023 di berbagai media. Lebih dari 500 berita terkait IPOC 2023 terbit di media lokal, nasional, dan internasional dalam berbagai bahasa. ■

GAPKI Berikan Masukan PENGUATAN PERMENTAN NO. 01 TAHUN 2018

GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Azis Hidayat dan Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR Muhammad Iqbal.



Untuk memperkuat implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang berhubungan dengan penetapan harga tandan buah segar (TBS) pekebun, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengadakan diskusi dan meminta masukan pemangku kepentingan. Agenda bertajuk Penguatan Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun ini diselenggarakan di Aston Priority, Jakarta Selatan pada 6 November 2023.

GAPKI memberikan beberapa masukan antara lain adanya Permentan yang khusus mengatur petani swadaya terpisah dengan petani yang bermitra.

Dalam kegiatan ini, GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Azis Hidayat dan Ketua Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR Muhammad Iqbal. Selain perwakilan GAPKI, hadir juga narasumber lain seperti Prof. Ponten M. Naibaho, Guru Besar Universitas Sumatera Utara dan Ketua Kelompok Kerja Tim Perumus Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Provinsi Sumatera Utara. Penguatan Permentan No. 01



Tahun 2018 diharapkan menjadi solusi bagi pekebun maupun pabrik kelapa sawit.

Dalam diskusi ini, GAPKI memberikan beberapa masukan antara lain adanya Permentan yang khusus mengatur petani swadaya terpisah dengan petani yang bermitra, pembelian TBS bisa langsung ke lembaga pekebun tidak melalui perantara/pengumpul, perlu sanksi untuk petani yang tidak menjual TBS kepada mitra sesuai perjanjian. Selain itu, rumus perhitungan mitra swadaya harus dibedakan dengan mitra plasma dimana hasilnya harus lebih kecil nilainya daripada mitra plasma dengan tujuan agar kemitraan tidak rusak.

GAPKI juga mengusulkan penetapan harga mitra swadaya, pembelian TBS didorong melalui lembaga pekebun. Yang tidak kalah penting adalah buah yang berasal dari mitra swadaya perlu diperjelas kriteria buah dan kebunnya. Sedangkan yang berkaitan dengan tim penetapan

harga diusulkan agar keanggotaan tim ditetapkan oleh gubernur yang terdiri dari orang yang profesional dan kompeten. Jika terjadi deviasi harga CPO lebih dari 2.5%, harga TBS yang dipakai harga KPBN, jumlah minimal brondolan 8%-10% dan berat minimal buah 5 kg.

Dari diskusi ini, beberapa kesimpulan yang akan ditindaklanjuti antara lain Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Dir PPHBun) mengusulkan dalam batang tubuh Permentan dibuat dua hal terpisah antara pembelian TBS untuk mitra swadaya dan mitra plasma. Selain itu, Tim Penetapan Harga TBS dapat dievaluasi setahun sekali, jika terjadi deviasi harga CPO lebih dari 2.5% maka menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah. Jumlah brondolan yang tertulis wajib minimal, tapi masih dibicarakan di antara 8-10%. Kesimpulan ini akan dimasukkan dalam batang tubuh Pasal 15 Permentan No. 01 Tahun 2018. ■

Memperkuat Sekretariat, MENGGAPAI TUJUAN ORGANISASI

Peran sekretariat GAPKI yang semakin strategis diharapkan terus berkembang hingga menjadi rujukan industri sawit di Indonesia maupun di tingkat global.

Sebagai organisasi dengan 15 kantor cabang, GAPKI sangat *concern* pada pengembangan aspek kesekretariatan, baik di kantor pusat dan cabang.

Bagi sebuah organisasi, sekretariat adalah jantung dalam tata kelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu, GAPKI secara kontinu melakukan capacity building melalui Workshop Sekretariat Pusat dan Cabang di Hotel Santika, Belitung pada 31 Agustus - 3 September 2023. Workshop ini diikuti oleh 40 karyawan sekretariat GAPKI Pusat dan GAPKI Cabang.

Workshop ini diharapkan memperkuat pemahaman karyawan sekretariat di GAPKI Pusat dan Cabang tentang fungsi dan tugas personel sekretariat GAPKI, meningkatkan kemampuan, serta memperkuat pemahaman tentang aturan organisasi dalam menjalankan tugas kesekretariatan dalam organisasi GAPKI. Yang tidak kalah penting adalah membangun kebersamaan yang solid antara sekretariat kantor pusat dan kantor cabang. Karena itu, selain materi kesekretariatan, team building

untuk membangun kekompakan jadi bagian dari kegiatan ini.

Dalam organisasi GAPKI, manajemen kesekretariatan kantor pusat dipimpin Direktur Eksekutif dan di kantor cabang dipimpin Sekretaris Eksekutif. Tapi, ada cabang yang belum mempunyai Sekretaris Eksekutif, bahkan staff sekretariat.

informasi.

Peran sekretariat GAPKI yang semakin strategis diharapkan terus berkembang hingga menjadi rujukan industri kelapa sawit di Indonesia maupun di tingkat global.

“Karena itu, Kapasitas dan kapabilitas tim sekretariat menjadi faktor penting agar peran sekretariat



“Sekretariat membantu pengurus GAPKI dalam menjalankan program kerja organisasi, koordinasi kegiatan dan program kerja internal maupun dengan eksternal GAPKI,” kata Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng. Ini peran pokok selain fungsi korespondensi, dokumentasi, pengarsipan, dan perumusan sumber

dapat lebih maksimal,” katanya.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selain pengetahuan dan skill kesekretariatan, workshop ini dilanjutkan dengan team building melalui kegiatan outbound. ■

GAPKI Dukung UKMK SAWIT GO INTERNATIONAL

Produk yang dipamerkan adalah buatan mitra BPDPKS yang mewakili asosiasi-asosiasi petani sawit, Santripreneur UKMK Sawit dan lain-lain.

Produk berbasis sawit buatan Usaha Kecil Menengah & Koperasi (UKMK) jadi etalase menarik untuk mempromosikan komoditas sawit. Apalagi kalau kualitas produk itu sesuai kebutuhan pasar luar negeri sehingga peluang ekspor terbuka luas. Karena itu, GAPKI mendukung pameran produk berbasis sawit buatan UKMK yang diselenggarakan oleh BPDPKS seperti Gebyar UMKM Berbasis Sawit Just Saw It UMKM di Mall Olympic Garden Malang, Jawa Timur, 10 November 2023. Selain pameran, juga berlangsung talkshow,

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk strategis dan penguatan hilirisasi komoditas kelapa sawit,”

dan lomba promosi kebaikan sawit.

Dalam ajang ini GAPKI diwakili oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Wakil Ketua Umum III Satrija B. Wibawa. Dukungan ini diharapkan dapat membantu upaya UKM dan Koperasi sawit untuk go international. Produk yang dipamerkan adalah buatan mitra BPDPKS yang mewakili asosiasi-asosiasi petani sawit,



Santripreneur UKMK Sawit, termasuk UKM dari perguruan tinggi yang sukses mengkomersialkan hasil riset yang didukung program Grant Riset Sawit BPDPKS. “Kualitas produk UKMK sawit ini cukup baik,” kata Eddy Martono.

BPDPKS berperan penting mendukung program dunia perkelasawitan, termasuk program kerja GAPKI. Beberapa dukungan yang telah diberikan BPDPKS, kata Eddy Martono, antara lain lomba lari maraton di perkebunan sawit yang sudah berlangsung tiga kali, konferensi minyak nabati di Pakistan, dan beberapa program lain. “Beberapa kegiatan GAPKI juga mendapatkan dukungan BPDPKS,” katanya.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pameran produk berbasis sawit dari UKMK Sawit di Malang ini yang ketiga setelah event serupa di Yogyakarta pada 28- 30 Juli 2023 dan di Palembang pada 29 September - 1 Oktober 2023.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan sawit sebagai produk strategis dan penguatan hilirisasi komoditas kelapa sawit,” katanya. Karena itu, pameran produk UKMK Sawit sangat penting dalam mengenalkan kebaikan-kebaikan sawit.

Peran UKMK Sawit mendapat perhatian khusus BPDPKS sehingga ada direktorat yang memiliki tugas menjalankan kemitraan. “Salah satunya menjalankan fungsi kemitraan dengan UKMK,” katanya.

Sepanjang tahun 2023 hingga Oktober 2023, BPDPKS telah menjalankan kemitraan UKMK Sawit yang dikemas dalam 59 kegiatan. Kegiatan itu antara lain partisipasi produk UKMK sawit di ASEAN Finance Minister Meeting di Bali dan Jakarta, Indonesia City Expo di Makassar, Indonesia Catalogue Expo and Forum, workshop pengolahan sawit untuk pra CPO dan lain-lain. ■



WWF dan Pebisnis India STUDI BANDING SAWIT KE GAPKI

Delegasi India menjelaskan kondisi sawit di negerinya dan rencana India mengembangkan lahan sawit hingga 2 juta hektar dalam lima tahun ke depan.

GAPKI kedatangan tamu dari India yang berasal dari LSM, pemerintahan, dan pebisnis yang memahami sawit lebih jauh. Mereka terdiri dari Vishal Dev (Director of Sustainable Business WWF India), Pratibha Bajeva (Expert Commodities and Sustainable Supply Chain WWF India), Bipul Das (Joint Secretary to the Gov't of Assam), Ajeet Kumar Sahu (Government of India), Abhay Goyal (Director of Ajanta Soya, Ltd), Harshal Thakare (Galaxy Surfactants). Mereka didampingi oleh Angga Pratama, Sustainable Palm Oil leader WWF Indonesia.

Rombongan dari India diterima oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Waketum I Sany Anthony, Wasekjen Lolita Bangun, Kabid Sustainability Bambang Dwi Laksono, dan Ketua Kompt. Percepatan ISPO Ismu Zulfikar di Restoran Pulau Dua,

Jakarta pada 21 November 2023. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengenalkan pengurus GAPKI dan organisasi GAPKI yang meliputi jumlah anggota, produktivitas sawit di Indonesia, petani plasma, kewajiban FPKM 20%, dan serangan jamur Genoderma.

Sedangkan Waketum I Sany Anthony berfokus memaparkan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari WWF India. Materi lain yang dipaparkan adalah tentang TBS (tandan buah segar), minyak sawit mentah, kotoran CPO, dan lain-lain yang berkaitan dengan produktivitas tanaman.

Adapun Bambang Dwi Laksono dan Ismu Zulfikar berfokus pada materi tentang isu deforestasi dan program keberlanjutan. Sementara itu, Lolita Bangun lebih banyak bertanya bantuan pemerintah India kepada

industri sawit India.

Dalam pertemuan ini, delegasi India menjelaskan tentang kondisi sawit di India dan rencana India mengembangkan lahan sawit hingga 2 juta hektar dalam lima tahun ke depan. Saat ini, luas lahan sawit di Indonesia sekitar 500-600 ribu hektar. Perluasan hingga 100 ribu hektar di Assam State menjadi target jangka pendek. India merasa beruntung karena lahan perkebunan yang sudah digunakan dan akan digunakan tidak menyentuh kawasan hutan sama sekali.

Karena itu, India yakin bisa mengantisipasi kampanye negatif tentang sawit karena celah yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye sedikit sekali. Setelah mendapatkan penjelasan dari GAPKI, mereka mengunjungi kebun sawit di Riau sampai masa kunjungan di Indonesia berakhir pada 26 November 2023. ■

”Hanya orang optimis yang akan bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan.”

MONA SURYA
Bendahara Umum GAPKI

Komitmen dan Kontribusi GAPKI DALAM PERCEPATAN ISPO

Kementerian Pertanian juga sedang melakukan revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang ISPO.

Sertifikat ISPO menjadi persyaratan penting meningkatkan daya saing komoditas sawit dan bentuk komitmen terhadap peraturan serta program keberlanjutan. Karena itu, sertifikasi ISPO diberlakukan untuk perusahaan maupun petani. Di sinilah peran GAPKI dalam meningkatkan partisipasi perusahaan dan petani untuk memiliki sertifikat ISPO. Komitmen GAPKI mendorong sertifikasi ISPO untuk anggota ditegaskan dalam Rapat Percepatan ISPO yang diselenggarakan oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian pada 15 November 2023.

Rapat ini dihadiri oleh Ketua Sekretariat Tim Sarpras, Ketua Kelompok PUP, Ketua Kelompok Penerapan dan Pengawasan Mutu, Ketua Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Mutu Tani Sawit dan Aneka Palma, Koordinator Biro Hukum Setjen Kementan. GAPKI diwakili oleh Ketua Bidang Perkebunan R. Aziz Hidayat dan Ketua Komp. Percepatan ISPO Ismu Zulfikar. "GAPKI diharapkan berkolaborasi mempercepat ISPO untuk anggotanya dan kebun plasma mitranya," kata Direktur PPHP Kementan, Prayudi Syamsuri.

Dalam rapat ini dijelaskan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan perubahan Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Di sisi lain, Kementerian Pertanian juga sedang melakukan revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang ISPO.

Perubahan Perpres tentang ISPO diharapkan sudah terbit sebelum 31 Desember 2023 sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBN dan BDPKS untuk sertifikasi ISPO, terutama bagi petani. ■



Berikut ini adalah poin-poin penting harapan pemerintah terhadap GAPKI dalam mendorong sertifikasi anggotanya maupun petani yang menjadi mitranya.

- 1** Pemerintah mempercepat sertifikasi ISPO, termasuk untuk lahan plasma petani yang telah bermitra dengan anggota GAPKI. Pemerintah juga membantu pembiayaan untuk pengurusan STDB, PUP dan prakondisi penerapan ISPO dan biaya audit.
- 2** Anggota GAPKI diminta mengajukan sertifikasi ISPO plasma dan pekebun yang sudah bermitra. GAPKI juga diminta mengidentifikasi masalah bagi anggotanya yang belum mengajukan sertifikasi ISPO.
- 3** GAPKI diminta aktif memberikan masukan dalam penyusunan revisi Permentan No. 38 Tahun 2020 tentang ISPO. Perusahaan yang sudah lulus ISPO diminta mendorong dan membantu pemasoknya untuk sertifikasi ISPO.

7 Rekomendasi GAPKI Sumut DALAM IPOS FORUM 2023

“IPOS merupakan wadah pemangku kepentingan sawit untuk mendiskusikan masalah yang jadi isu utama,”

GAPKI Sumatera Utara menyerahkan tujuh rekomendasi dan masukan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) 2023 yang berlangsung di Medan pada 26-27 Oktober 2023. Forum tahunan kali ini berfokus membahas masalah program PSR, pengujian rendemen TBS pekebun, tindak pidana ringan (Tipiring), regulasi tata ruang wilayah, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).

IPOS Forum yang didukung oleh BDPKPS ini diikuti oleh 500 peserta dengan menghadirkan 20 narasumber dalam tujuh sesi diskusi. “IPOS merupakan wadah pemangku kepentingan sawit untuk mendiskusikan masalah yang jadi isu utama,” kata Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Sumatera Utara. Salah satu isu yang menjadi bahasan utama pada hari pertama adalah legalitas lahan kebun sawit guna mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.

Sebagai provinsi penghasil komoditas sawit di Indonesia, Sumatera Utara sangat penting. Di sisi lain, ada sebagian kebun anggota GAPKI yang diidentifikasi masuk kawasan hutan. “Ini sangat krusial. Karena itu GAPKI Sumut dan GAPKI Pusat terus berjuang menyelesaikan masalah itu,” katanya.

Menurut Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, dari 3,3 juta hektar lahan HGU yang diidentifikasi masuk kawasan hutan. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan investasi. “Hal seperti ini perlu kepastian hukum,” katanya. Di akhir acara IPOS Forum 2023, GAPKI Sumut memberikan tujuh rekomendasi yang berasal dari pandangan 20 narasumber acara. ■



REKOMENDASI GAPKI SUMUT

- | | |
|---|---|
| <p>1 Pemerintah perlu meningkatkan dukungan finansial dan dukungan teknis untuk program PSR serta memberikan solusi konkret atas hambatan yang dialami petani sawit seperti area kebun sawit masuk kawasan hutan, hingga tumpang tindih status lahan.</p> | <p>2 Kementerian Pertanian perlu memastikan kejelasan dan transparansi peraturan pengujian rendemen TBS pekebun. GAPKI dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat berkontribusi dengan menyusun pedoman dan praktik terbaik untuk mendukung proses ini.</p> |
| <p>3 Pengawasan dan perizinan PKS berondolan dan tanpa kebun perlu lebih ketat melalui sistem OSS, pembenahan rantai pasok dengan memastikan pengiriman TBS dan berondolan ke PKS yang sama. Perlu pelatihan tentang risk management untuk antisipasi fluktuasi harga TBS.</p> | <p>4 Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan perusahaan sawit dalam penanganan Tipiring. Perlu dukungan pemerintah daerah dalam mediasi konflik sehingga mata rantai pelanggaran hukum dapat dideteksi, dicegah dan ditindak jika diperlukan.</p> |
| <p>5 Pemerintah harus cermat menerapkan peraturan penetapan kawasan hutan dalam RTRW. Pihak kehutanan dan <i>stakeholders</i> sawit perlu bersinergi dalam menerapkan regulasi untuk memastikan kejelasan dan kepastian dengan mengacu UU dan hak-hak masyarakat.</p> | <p>6 Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah meningkatkan kerjasama untuk memastikan distribusi dan manfaat DBH sawit sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk mendukung pembangunan daerah.</p> |
| <p>7 Kementerian Pertanian dan Ditjenbun perlu memastikan keamanan data SIPERIBUN. Anggota GAPKI, perusahaan sawit, dan <i>stakeholders</i> terkait harus menyediakan data yang akurat dan terbaru untuk SIPERIBUN untuk kebaikan bersama.</p> | |

JAGA SAWITAN JADI PERCONTOHAN DI RDA 2023



Sebelumnya JAGA SAWITAN mengadakan dialog sosial nasional di Bali pada 31 Oktober – 1 November 2023 untuk menyambut IPOC 2023 di Bali pada 1-3 November 2023.

JAGA SAWITAN diundang untuk menjadi pemateri dalam *Rural Development Academy* (RDA) 2023 guna membahas pedesaan tanpa pekerja anak, kesetaraan jender, dialog sosial, kerja layak, dan K3. Forum ini diinisiasi oleh ILO (International Labour Organization) di kampus ILO di Turin, Italia pada 4-8 Desember 2023. Ketua GAPKI Bidang Pengembangan SDM Sumarjono Saragih mewakili kelompok pengusaha dan kalangan buruh diwakili oleh Sekretaris Eksekutif JAPBUSI Nursana Marpaung. Forum ini diikuti 90 peserta dari 32 negara.

“RDA adalah forum berbagi pengalaman dan inisiatif pembangunan pedesaan dari berbagai belahan dunia,” kata Sumarjono Saragih. JAGA SAWITAN diundang mewakili komunitas sawit Indonesia untuk memberikan inspirasi atas inisiatif dan capaian yang

dilakukan oleh ILO, GAPKI dan JAPBUSI sejak 2016. Semua materi di RDA 2023 ternyata sudah dilakukan Indonesia. “Ini cara efektif kampanye sawit di Eropa oleh buruh dan pengusaha,” katanya.

Menurut Sumarjono Saragih, pembangunan pedesaan (*rural development*) menyimpan banyak pekerjaan rumah. Padahal, pedesaan menjadi harapan kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Karena itu, ekonomi pedesaan harus tangguh, menarik orang muda, inklusif dan menyediakan peluang kerja layak, serta berkeadilan sosial. “Peran sawit sangat nyata di pedesaan di Indonesia,” kata Sumarjono yang juga Chairman Founder WISPO (Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil).

Salah satu pembelajaran dari Indonesia adalah kolaborasi GAPKI dan JAPBUSI dalam wadah JAGA SAWITAN sebagai wadah bersama (bipartit)

sebagai buah dari dialog sosial yang dibantu ILO sejak 2016. Kolaborasi ini yang menjadikan komoditas sawit di Indonesia menggerakkan ekonomi pedesaan, meningkatkan dan mendorong kualitas kerja layak yang sesuai dengan standar internasional.

Sebelumnya, JAGA SAWITAN mengadakan *Workshop Dialog Sosial Jaga Sawitan* di Medan pada 24-25 Oktober 2023 dan dialog sosial nasional di Nusa Dua, Bali pada 31 Oktober – 1 November 2023 untuk menyambut IPOC 2023 di Bali pada 1-3 November 2023. “GAPKI berkomitmen pada perbaikan aspek ketenagakerjaan,” kata Wakil Ketua Umum II GAKPI Susanto dalam opening speech dialog nasional ini. Dialog forum ini harus ditundakan hingga daerah untuk menciptakan ekonomi inklusif, setara dan berkeadilan dalam menciptakan kerja layak. ■

Borneo Forum VI

FOKUS TIGA SOLUSI

Ada tiga persoalan yakni, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), keberlanjutan area kebun sawit masuk dalam kawasan hutan, Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM).



Borneo Forum kembali diselenggarakan. Hajat tahunan ini merupakan yang ke-6 setelah lima *event* sebelumnya. Digelar di Hotel Plaza, Tarakan, Kalimantan Utara pada 14-15 November 2023, forum ini mengangkat tema Mewujudkan Sawit Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Event* ini dihadiri Ketua Umum GAPKI Eddy Martono, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Walikota Tarakan Khairul dan perwakilan pengurus GAPKI dari seluruh Indonesia serta mahasiswa Universitas Borneo Tarakan.

Borneo Forum VI didukung oleh GAPKI Kalimantan Timur, GAPKI Kalimantan Selatan, GAPKI Kalimantan Barat, GAPKI Kalimantan Tengah, GAPKI Kalimantan Utara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan BPDPKS. Ada tiga persoalan yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini yakni, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), keberlanjutan area kebun sawit masuk dalam pembangunan kawasan hutan, dan fasilitas pembangunan kebun masyarakat (FPKM).

“Masing-masing persoalan kita

bahas bersama para ahlinya,” kata Ketua GAPKI Kalimantan Utara (Kaltara) Hendra Lintung. Solusi ini penting karena di Kaltara ada 579.420 hektar kebun sawit yang tersebar di Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Nunukan dan Malinau. Seluas 150.000-an hektar diantaranya kebun milik rakyat dan sisanya milik 57 perusahaan. Selain itu, ada 20 pabrik kelapa sawit. “Kebun sawit memberi manfaat langsung bagi APBD dan masyarakat,” kata Gubernur Zainal Arifin Paliwang. Pada 2023, Provinsi ini menerima DBH Sawit Rp 10,4 miliar; Bulungan Rp 8,7 miliar; Malinau Rp 11,08 miliar; Nunukan Rp 14,6 miliar; Tana Tidung Rp 6,3 miliar; Kota Tarakan Rp 5,03 miliar.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan potensi sawit di Kaltara cukup besar. Tarakan bisa menjadi pelabuhan ekspor untuk menampung CPO dari Kaltara, Kaltim, maupun Sulawesi. Di Kaltara juga bisa dibangun pabrik pengolahan untuk produk hilir. “Pabrik hilirisasi itu untuk konsumsi dalam negeri. Kita produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia,” katanya. Pabrik ini diharapkan bisa menekan biaya produksi karena dekat dengan pasar.



Terkait indikasi kebun sawit di Kaltara masuk kawasan hutan, perlu diklarifikasi kepada Satgas Sawit. Sebab, ada beberapa kebun sawit yang diindikasikan masuk kawasan hutan ternyata sudah memiliki hak guna usaha (HGU). Begitu juga dengan FPKM sebesar 20% perlu dilihat secara jernih karena banyak perkebunan sawit dibangun di bawah tahun 2007. Padahal dasar kewajiban FPKM adalah Permentan Nomor 26 Tahun 2007.

Menurut Eddy Martono, lahan untuk memenuhi FPKM sudah tidak ada. “Kalaupun ada itu sudah masuk areal kawasan hutan,” katanya. Terkait PSR, Eddy Martono menegaskan bahwa dunia usaha berkomitmen mendukung percepatan program ini karena PSR akan berpengaruh besar pada produktivitas tanaman sawit di masa mendatang. ■

Mandat ESG, ANTARA KENDALA DAN KESEMPATAN

Upaya kolaboratif kita hari ini dalam menyelaraskan kebijakan ESG dan pelestarian privasi serta mata pencaharian, membuka jalan bagi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai delegasi satu-satunya yang termuda dalam forum 19th Indonesian Palm Oil Conference 2023 & 2024 Price Outlook pada 1-3 November 2023 di Bali, saya mendengarkan langsung pembahasan komoditas sawit dari para pemateri. Berbagai tema dibahas secara mendalam sehingga memberikan perspektif yang lebih luas tentang kelapa sawit bagi saya. Berangkat dari pemahaman yang saya dapatkan dan pengetahuan awal, saya ingin menyampaikan opini saya tentang komoditas sawit dalam kaitannya dengan Environmental Social Governance (ESG).

Secara umum, ESG adalah konsep yang mendedepankan kegiatan pembangunan, investasi dan bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan tiga kriteria tersebut yaitu lingkungan, sosial serta tata kelola. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial serta tata kelola yang sesuai. Intinya, ESG hadir untuk mendukung perusahaan menyeimbangkan bisnis yang sehat untuk jangka panjang. Dari pengertian inilah saya ingin mengaitkan dengan sawit sebagai komoditas utama Indonesia.

Kelapa sawit adalah industri strategis yang menjadi tonggak awal industri hilir nasional lainnya untuk mencapai market access dalam era ekonomi global. Tapi, di era kesadaran lingkungan, tuntutan akan kepatuhan industri sawit dalam topik lingkungan, sosial, dan tata kelola industri hulu sawit menjadi semakin jelas. Kendala yang dihadapi oleh perkebunan sawit patut menjadi pusat perhatian pemerintah dan industri hilir sawit. Sebab, kendala tersebut dapat memberi kesempatan untuk membangun regulasi dan industri pendukung lainnya.

Untuk memberikan akses pasar kepada seluruh industri hulu dan hilir sawit ke ekonomi maju, perkebunan sawit Indonesia dituntut mematuhi EUDR mulai tahun 2025. EUDR mewajibkan perusahaan EU memverifikasi produk yang diimpor tidak diproduksi atas lahan



SOPHIE YASA

deforestasi. Verifikasi bisa dilakukan melalui audit lapangan dan data satelit Copernicus.¹ Dalam konteks ini, regulasi ESG dari negara maju bukan sebatas untuk industri kebun sawit, melainkan juga industri hilir yang mengelolah komoditas sawit.

Dalam mengimpor produk berbasis sawit, perusahaan di ekonomi maju menerapkan kriteria yang lebih ketat dalam memantau rantai pasokan produk yang diimpor. Menurut publikasi Boston Consulting Group, perusahaan akan menyisipkan ESG ke dalam inti model operasional mereka. Misalnya memberikan skor risiko terhadap produk dan perusahaan rantai pasokan mereka dan berkolaborasi dengan sesama perusahaan dalam industri mereka meningkatkan kesadaran mengenai ESG dalam ekosistem bisnis mereka.

Salah satu kendala signifikan dalam implementasi kebijakan ESG adalah potensi marginalisasi petani kebun plasma. Padahal petani plasma sangat penting bagi perkebunan sawit besar karena pentingnya hubungan simbiosis ini. Dengan mendukung dan memberdayakan petani lokal, perkebunan dapat menjamin sumber bahan baku yang konsisten dan berkualitas sambil berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial komunitas di mana mereka beroperasi. Selain itu, kolaborasi dengan petani lokal dapat meningkatkan transparansi dan praktik etis, sejalan dengan standar keberlanjutan global dan memperkuat reputasi perusahaan di pasar.

Untuk mengatasi kendala ini, pengembangan algoritma blockchain mungkin saja diterapkan sebagai salah satu solusi. Teknologi ini dipresentasikan oleh U. R. Unnithan, Co-founder & CEO DIBIZ di forum IPOC 2023. Teknologi ini bertujuan melindungi privasi petani plasma dengan menyaring informasi yang tidak perlu dan hanya menyediakan data terkait pasokan yang menghormati privasi semua pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi ini merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa ketika kebijakan ketat ESG diterapkan, perkebunan kecil Indonesia tidak dirugikan.

Pendekatan ini juga memungkinkan perkebunan inti menjaga otonomi mereka dan melibatkan kerja sama dengan petani plasma mereka untuk memastikan individu-individu ini tetap dapat menjual panen mereka dengan harga pasar

yang kompetitif, dan menghindari penalti akibat mandat ketat ESG dari luar negeri. Upaya kolaboratif ini sejalan dengan kebijakan etis dan menjaga mata pencaharian komunitas pertanian lokal kita.

Merangkul kemajuan teknologi seperti algoritma blockchain sambil memastikan standar etis dijaga menjadi faktor krusial bagi petani dan produsen lokal kita.

Upaya kolaboratif kita hari ini dalam menyelaraskan kebijakan ESG dan pelestarian privasi serta mata pencaharian, membuka jalan bagi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mari kita terus memperjuangkan transparansi, inovasi, dan praktik etis, memberdayakan komunitas dan industri kita untuk dunia yang lebih hijau dan adil. ■

*Penulis adalah kandidat IB Diploma di SMA ACS Jakarta yang tertarik mendalami teknik kimia

”Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah.”

SATRIJA B. WIBAWA
Wakil Ketua Umum III GAPKI



GAPKI SUMUT Membangun Sinergi DAN SOLIDITAS ORGANISASI

“Fokus GAPKI Sumut ke depan membantu mempercepat program kemitraan PSR,” kata Timbas Prasad Ginting.

Sumatera Utara menempati posisi istimewa dalam dunia perkelapasawitan Indonesia. Di sinilah duo Belgia, Adrien Hallet dan K. Schadt mendirikan perkebunan sawit komersial pertama kali di Indonesia. Tempatnya di Deli, kawasan di pantai timur Sumatera dan di Sungai Liat, Aceh. Sawit ternyata cocok dengan Sumatera Utara. Perkembangannya menakjubkan. Hingga tahun 1980-an, luas lahan sawit di Indonesia sudah 200 ribu hektar. Sumatera Utara tetap menjadi sentra karena perkebunan milik pengusaha Indonesia maupun milik negara terus bertumbuh.

Pertumbuhan komoditas sawit ini direpson oleh beberapa pengusaha yang kemudian sepakat mendirikan wadah bersama yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 27 Februari 1981 di Medan. GAPKI menjadi magnet bagi pengusaha sawit di provinsi lain untuk saling memperkuat kerjasama. Permintaan untuk mendirikan GAPKI cabang terus bermunculan. GAPKI Sumatera Barat dibentuk pada 17 Mei 2001, disusul GAPKI Sulawesi pada 8 Maret 2004, GAPKI Kalimantan Tengah pada 28 April 2004 dan GAPKI Riau pada 23 Agustus 2004.

Terbentuknya GAPKI cabang

mendorong pengurus menyatukan visi dan misi agar menjadi satu kesatuan. Sejalan dengan sinkronisasi program kerja dalam Rakernas I GAPKI di Pekanbaru pada 7 Desember 2004, GAPKI membentuk GAPKI Cabang Sumatera Utara. Pengukuhan pengurus GAPKI Sumut dilakukan di Medan pada 11 Januari 2005. Derom Bangun menjadi ketua dengan tugas utama membentuk pengurus GAPKI Sumatera Utara yang definitif.

Kerja keras pengurus membuahkan hasil. Dalam Musyawarah Cabang GAPKI Sumut di Medan pada 21 Desember 2006 pengurus GAPKI periode 2006-2009 definitif berhasil ditetapkan. Balaman Tarigan dari PT Perkebunan Nusantara IV terpilih sebagai ketua. Balaman kembali dipercaya menahkodai GAPKI Sumut periode berikutnya yakni 2010-2012. Sebagai sebuah organisasi, GAPKI Sumut berkembang dari hari ke hari dengan programnya. Jumlah anggota bertambah. Hingga 2023, anggota GAPKI Sumut mencapai 90 perusahaan sawit.

“Fokus GAPKI Sumut ke depan membantu mempercepat program kemitraan PSR,” kata Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Sumut periode 2023-2028 setelah terpilih sebagai ketua dalam Muscab GAPKI



GAPKI SUMUT

PERIODE 2005-2006

Ketua: Derom Bangun

PERIODE 2006-2009

Ketua: Balaman Tarigan

PERIODE 2010-2012

Ketua: Balaman Tarigan

PERIODE 2014-2017

Ketua: Setia Dharma Sebayang

PERIODE 2017-2023

Ketua: Alexander Maha

PERIODE 2023-2028

Ketua: Timbas Prasad Ginting

Sumut pada 12 Juni 2023. Berbagai program kerja dikembangkan dalam rangka menjadikan organisasi semakin solid sehingga manfaatnya selangit. Pemprov Sumut berharap GAPKI Sumut kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. ■

GAPKI SUMSEL

Membangun Superteam, BUKAN SUPERMAN

Jumlah anggota GAPKI Sumsel ini setara dengan 29% dari total 276 perusahaan yang beroperasi di bumi Sriwijaya.

Sebagai daerah dengan anugerah tanah yang subur, Sumatera Selatan merupakan daerah yang cocok untuk komoditas kelapa sawit. Puluhan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit berdiri sejak puluhan tahun lalu. Mereka berhimpun dalam Gabungan Perusahaan Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS). Sebanyak 35 perusahaan anggota asosiasi ini kemudian bersepakat membentuk GAPKI Sumatera Selatan pada 14 Agustus 2006.

GAPKI Sumsel menjadi GAPKI cabang ke-9 setelah GAPKI Cabang Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Sejak dibentuk pada 2006, GAPKI Sumsel dipimpin oleh Sairozi. Namun, pergantian pengurus dilakukan pada 26 April 2007 karena Sairozi pindah tugas ke Jakarta. GAPKI Sumsel kemudian dipimpin oleh Sumarjono Saragih sebagai Ketua dan Benny Indra Gunadi sebagai Sekretaris.

Pelantikan Pengurus GAPKI Sumsel periode 2007-2010 dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Pusat H. Akmaluddin Hasibuan di Palembang pada 2 Agustus 2007 yang disaksikan Gubernur Sumsel Syahril. Tanggal pelantikan ini kemudian ditetapkan sebagai tanggal resmi berdirinya GAPKI Sumsel. Pasangan Sumarjono Saragih dan Benny Indra Gunadi dipercaya lagi menjadi nakhoda GAPKI Sumsel periode 2010-2013.

Sejak 2007 hingga 2009, Kantor Sekretariat GAPKI Sumsel bertempat di PT London Sumatra Indonesia, Tbk dengan mempekerjakan satu orang sekretaris eksekutif. Kantor GAPKI pindah ke sebuah bangunan sewa pada 2009 hingga 2011. GAPKI Sumsel



akhirnya memiliki kantor sendiri sebagai aset organisasi sejak 2011 hingga sekarang.

GAPKI Sumsel berkomitmen terus memberikan manfaat untuk anggota, pemerintah, hingga masyarakat luas. Keberadaan GAPKI Sumsel semakin diterima yang dibuktikan dengan makin banyak perusahaan yang bergabung. Hingga akhir 2023, sebanyak 77 perusahaan bergabung menjadi anggota GAPKI Sumsel dengan luas lahan sekira 350 ribu hektar. Jumlah anggota GAPKI Sumsel ini setara dengan 29% dari total 276 perusahaan yang beroperasi di bumi Sriwijaya.

"Pengurus GAPKI Sumsel harus menjadi superteam, ini bukan jaman superman yang one man show," kata Alex Sugiarto, Ketua GAPKI Sumsel periode 2019-2024 dalam pidato pelantikan pengurus GAPKI Sumsel periode 2019-2024 di Hotel Harper Palembang pada 12 Februari 2020. Alex Sugiarto mengajak GAPKI Sumsel bersinergi dengan GAPKI Pusat untuk menjalankan misi dalam rangka mewujudkan visi organisasi. ■



GAPKI SUMSEL

PERIODE 2007-2010

Ketua: Sumarjono Saragih

PERIODE 2010-2013

Ketua: Sumarjono Saragih

PERIODE 2013-2016

Ketua: Rusdan Zaini Lubis
(PAW 2015 diganti oleh Joko Wahyu Priadi)

PERIODE 2016-2019

Ketua: Harry Hartanto

PERIODE 2019-2024

Ketua: Alex Sugiarto

GAPKI RIAU Mengutamakan SEMANGAT KEBERSAMAAN



Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak perusahaan sawit di Riau bergabung dengan GAPKI.

Bumi Lancang Kuning adalah tanah yang ramah bagi kelapa sawit. Seperti makna Lancang yakni kapal besar, Riau adalah provinsi dengan kebun sawit yang sangat besar. Bahkan yang terluas di Indonesia dengan total 3,9 juta hektar pada 2023. Bahkan, sejak GAPKI Cabang Riau dibentuk pada Agustus 2004, Riau memiliki kebun sawit 1,3 juta hektar. Luas kebun sawit Riau pada 2023 setara 20,68% dari seluruh lahan sawit di Indonesia. Puluhan perusahaan kelapa sawit berdiri di sini. Sebanyak 19 perusahaan sepakat membentuk GAPKI Cabang Riau pada 23 Agustus 2004.

Pada awal kepengurusan, GAPKI Riau dipimpin oleh Joko Supriyono sebagai Ketua dan Zulbahri sebagai Sekretaris. Layaknya organisasi pengusaha perkebunan sawit, GAPKI Riau berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah setempat dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi anggotanya, GAPKI Riau diharapkan menjadi wadah untuk bersama-sama berkontribusi bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Riau.

Dalam mewujudkan perannya, GAPKI Riau menyuarkan aspirasi

anggota. Kolaborasi GAPKI Riau dan pemerintah dilakukan di banyak kegiatan.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak perusahaan sawit di Riau bergabung dengan GAPKI. "Saya harap semua perusahaan sawit di Riau masuk GAPKI," katanya dalam pelantikan Pengurus GAPKI Riau periode 2017-2020 di Pekanbaru pada 11 Agustus 2017.

Beberapa program GAPKI Riau yang dilakukan antara lain pencegahan Karhutla, pendampingan petani untuk PSR, dukungan program Jaga Zapin, sampai program 1.000 rumah untuk pekerja di sektor sawit hasil kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau, Bank BNI, BP Jamsostek, dan asosiasi petani.

Saat ini GAPKI Riau berkembang bersama segala dinamikanya. Namun, spirit kebersamaan membuat organisasi ini semakin matang. "Kita harus kompak dan berpikir apa yang bisa kita berikan untuk organisasi," kata Lichwan Hartono Ketua GAPKI Riau periode 2022-2027 saat perayaan HUT ke-42 GAPKI di Pekanbaru pada 27 Februari 2023.

Kini, GAPKI Riau beranggota 65 perusahaan dari 286 perusahaan sawit di Riau. Luas lahan anggota GAPKI Riau 410.803 hektar. ■



GAPKI RIAU

PERIODE 2004-2007

Ketua: Joko Supriyono

PERIODE 2007-2010

Ketua: Wisnu Oriza Suharto

PERIODE 2010-2014

Ketua: Wisnu Oriza Suharto

PERIODE 2014-2015

Ketua: Hinsatopa Simatupang

PERIODE 2015-2017

Ketua: Saut Sihombing

PERIODE 2017-2019

Ketua: Saut Sihombing

PERIODE 2019-2020

Ketua: Lichwan Hartono

PERIODE 2020-2021

Ketua: Jatmiko K. Santosa

PERIODE 2021-2022

Ketua: Lichwan Hartono

PERIODE 2022-2027

Ketua: Lichwan Hartono

GAPKI BENGKULU

Mengembangkan Anggota, MENEBAR MANFAAT

Gubernur Bengkulu memberi dukungan dan mengajak perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI.



Tanah pulau Sumatera seperti ditakdirkan berjodoh dengan kelapa sawit. Tidak hanya di lahan pertama sawit disebar sebagai tanaman hias pinggir jalan di Deli, Sumatera Utara pada 1875, sawit juga tumbuh subur di Bengkulu. Jarak 1.200 km lebih antara Deli dan Bengkulu bukanlah penghalang sawit untuk berkembang. Tidak hanya ditanam oleh petani maupun pekebun, sawit juga dikembangkan oleh perusahaan. Sebagian perusahaan sawit di Bengkulu ini berhimpun dalam GAPKI, asosiasi pengusaha sawit yang berdiri pada 27 Februari 1981.

Tiga anggota GAPKI dari Bengkulu, yakni PT Sandabi Indah Lestari, PT Agricinal, dan PT Bio Nusantara Teknologi berinisiatif mengembangkan organisasi dengan membentuk GAPKI Cabang Bengkulu. Rapat dengan pengurus GAPKI Pusat di Jakarta pada 25 Januari 2013 menyepakati pengurus inti GAPKI Bengkulu dengan Daniel Manurung sebagai Ketua. Kepengurusan lengkap baru disusun pada 14 Februari 2013. Muscab pertama dan pelantikan pengurus digelar pada 18 April 2013. Sejak itu, GAPKI Bengkulu sah menjadi cabang



GAPKI BENGKULU

PERIODE 2013-2016

Ketua: Daniel Manurung

PERIODE 2016-2019

Ketua: John Irwansyah Siregar

PERIODE 2019-2024

Ketua: John Irwansyah Siregar

ke-11 GAPKI dengan 9 anggota.

Kehadiran GAPKI Bengkulu dirasakan manfaatnya oleh anggota, pemerintah dan masyarakat. GAPKI Bengkulu menjadi mitra pemerintah setempat. Pun bagi publik karena banyak kegiatan GAPKI yang menyentuh kehidupan mereka. Tidak heran anggota GAPKI bertambah dari semula sembilan perusahaan menjadi 15 perusahaan pada 2016-2019. Saat ini, perusahaan anggota GAPKI Bengkulu menjadi 14 perusahaan.

Visi dan misi GAPKI Bengkulu tentu sejalan dengan GAPKI Pusat. GAPKI Bengkulu tentu berfokus pada peningkatan ekonomi daerah

dan mendorong terwujudnya sawit berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas anggota. Wujudnya melalui aktivitas produktif yang menyentuh kepentingan anggota, pemerintah dan masyarakat Bengkulu. "GAPKI mendukung program pemerintah Bengkulu membangun industri hilir sawit," kata John Irwansyah Siregar, Ketua GAPKI Bengkulu periode 2016-2019 dan 2019-2024.

Selain pengembangan anggota, GAPKI Bengkulu memberikan perhatian besar pada kondisi yang terjadi di masyarakat. GAPKI adalah asosiasi yang diajak langsung oleh Pemprov Bengkulu dan pemkab di provinsi ini untuk vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Pengembangan fasilitas publik juga melibatkan GAPKI Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memberi dukungan dan mengajak perusahaan sawit bergabung dengan GAPKI.

Total lahan perkebunan sawit di Bengkulu mencapai 200 ribu hektar lebih dengan komposisi 65% milik rakyat dan 35% milik perusahaan. Total produksi kelapa sawit pada 2020 mencapai 234,83 ribu ton, yang terbesar dibandingkan komoditas lain. ■

GAPKI KALSEL Inovasi dan Riset Sawit BERKELANJUTAN



Inovasi sangat penting karena produktivitas sawit di Kalsel adalah yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Kalimantan Tengah.

Kalimantan Selatan adalah salah satu sentra perkebunan kelapa sawit Indonesia yang cukup strategis di Pulau Kalimantan. Dengan total luas 497.261 hektar, perkebunan sawit di Kalsel setara dengan 3,1% dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dengan luasan ini, produksi sawit yang dihasilkan setara 2,6% dari total produksi sawit nasional. Posisi strategis ini tidak hanya terjadi saat ini, namun sejak bertahun lalu sejak GAPKI Cabang Kalimantan Selatan dibentuk pada 8 Oktober 2004.

Ketika pertama dibentuk, anggota GAPKI Kalsel sebanyak 21 perusahaan kelapa sawit swasta dan pelat merah. Sekretariat pertamanya berada di ruangan kantor salah satu anggota GAPKI Kalsel yakni, Minamas Group di Banjarbaru. Sejalan dengan perkembangan organisasi, barulah di tahun 2012 kantor GAPKI Kalsel menempati bangunan sendiri di Kompleks Sinar Lestari, Landasan Ulin, Banjarbaru sampai sekarang. Perpindahan kantor ke bangunan milik sendiri menjadi parameter perkembangan GAPKI Kalsel.

Perkembangan GAPKI Kalsel tentunya tidak lepas dari peran penting yang dijalankan dalam berkontribusi kepada daerah

dan masyarakat. Sebagai wadah pengusaha sawit, GAPKI Kalsel menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah guna mendukung perekonomian daerah. Karena itu, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi program GAPKI Kalsel. Tidak hanya dengan pemerintah, GAPKI Kalsel juga menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Salah satu kolaborasi yang dijalain adalah dengan Universitas Lambung Mangkurat. Kerjasama ini fokus pada inovasi pengembangan sawit unggul dan berkelanjutan. Inovasi sangat penting karena produktivitas sawit di Kalsel adalah yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Kalimantan Tengah. "Kampus ULM tempat strategis untuk riset tentang sawit berkelanjutan," kata Ketua GAPKI Kalsel Eddy S. Binti di Banjarmasin pada 7 April 2021.

Sedangkan kolaborasi dengan pemerintah setempat mencakup antara lain pencegahan dan penanganan Karhutla, bantuan asap cair dari cangkang sawit untuk bahan disinfektan, program percepatan PSR, bantuan korban bencana alam, hingga pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lain-lain. "Manfaat keberadaan GAPKI Kalsel



GAPKI KALSEL

PERIODE 2004-2007

Ketua: Mubarak Ahmad

PERIODE 2007-2010

Ketua: Sunardi R. Taruna

PERIODE 2010-2016

Ketua: Untung Joko Wiyono

PERIODE 2016-2019

Ketua: Totok Dewanto

PERIODE 2019-2024

Ketua: Eddy S. Binti

harus lebih dirasakan oleh anggota dan masyarakat," kata Eddy S. Binti.

GAPKI Kalsel akan mengajak semua perusahaan sawit di Bumi Lambung Mangkurat bergabung dengan GAPKI. Saat ini, anggota GAPKI Kalsel tercatat 53 perusahaan. "Kami akan mengajak mereka bergabung dengan GAPKI," katanya. ■

GAPKI KALBAR Memperkuat Sinergi MEMBANGUN KALIMANTAN BARAT

Kontribusi lain GAPKI Kalbar adalah renovasi Gedung Listrik Balai Sertifikasi Keahlian Provinsi Kalbar dan menyerahkannya kepada Pemprov Kalbar pada 12 November 2023.



Kalimantan Barat merupakan tiga besar provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia bersama Riau dan Sumatera Utara. Sekitar 1,8 juta hektar kebun sawit rakyat dan perusahaan berada di provinsi Seribu Sungai ini. Yang memiliki izin beroperasi di sektor sawit hingga 2023 sebanyak 364 perusahaan. Yang bergabung dengan GAPKI Kalbar sebanyak 65 perusahaan. Gubernur Kalbar Sutarmidji merilis surat himbauan pada 14 Februari 2023 agar perusahaan sawit di daerahnya menjadi anggota GAPKI.

“Kami menyambut baik imbauan gubernur dan kami menyambut terbuka,” kata Ketua GAPKI Kalbar Purwati Munawir. Ia perempuan pertama yang memimpin GAPKI Kalbar sejak asosiasi ini dibentuk pada 2009. Dia terpilih sebagai Ketua dalam Muscab GAPKI Kalbar di Pontianak pada 7 Maret 2020. Tugas berat sudah menanti karena tantangan yang dihadapi oleh industri sawit di Kalimantan Barat tidaklah ringan. Apalagi GAPKI Kalbar adalah teman seiring perjalanan industri sawit di tanah Borneo ini.

Sejak awal pembentukannya, GAPKI Kalbar berperan sebagai



GAPKI KALBAR

PERIODE 2009-2011

Ketua: Lie Yongki

PERIODE 2012-2013

Ketua: Bernard Ho

PERIODE 2013-2017

Ketua: Baim Rachman,
Nurhidayat (PAW)
P. Girsang (PAW)

PERIODE 2017-2020

Ketua: Mukhlis Bentara

PERIODE 2020-2025

Ketua: Purwati Munawir

mitra strategis pemerintah serta pengembangan anggota. Implementasi peran ini diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti pencegahan Karhutla, percepatan PSR untuk petani, kolaborasi inovasi bersama Universitas Tanjungpura, donor darah, bantuan

korban banjir hingga pembangunan jembatan di beberapa lokasi di Kalimantan Tengah. GAPKI Kaltim terlibat aktif dalam pengembangan dan perawatan infrastruktur untuk publik.

Kontribusi lain GAPKI Kalbar adalah renovasi Gedung Listrik Balai Sertifikasi Keahlian Provinsi Kalbar dan menyerahkannya kepada Pemprov Kalbar pada 12 November 2023. Gedung ini digunakan untuk menunjang praktik kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Serah terima dilakukan oleh Ketua GAPKI Kalbar Purwati Munawir kepada pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson di ruang kerja Gubernur Kalbar.

Purwati Munawir mengatakan GAPKI Kalbar terus berperan membangun kebersamaan dan sinergi sesama anggota serta melakukan mediasi untuk mewujudkan industri sawit yang efisien, sehat dan berkelanjutan. Hal ini harus dilakukan bersama *stakeholders* terkait lainnya. “Kami ingin menjadikan GAPKI Kalbar sebagai organisasi yang tangguh dan bermanfaat,” katanya. Peran GAPKI Kalbar diharapkan semakin signifikan mengingat iklim investasi sawit di Kalbar dalam sepuluh tahun terakhir cukup baik. ■

GAPKI KALTIM

Menjadi Lokomotif Kemajuan
EKONOMI DAERAH

Beberapa anggota GAPKI Kaltim menjadi bapak angkat cabang olahraga basket, bisbol dan softbol untuk kontingan PON XVIII di Riau.

Era pengembangan sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak 1982 sampai sekarang. Rentang waktu yang panjang ini menjadikan Banua Etam sebagai provinsi dengan luas lahan sawit terbesar ke-4 di Indonesia. Sebanyak 88,33% dari total perkebunan di Kaltim perkebunan sawit. GAPKI Cabang Kalimantan Timur sendiri baru terbentuk tahun 2006. Awalnya pengusaha sawit berhimpun di Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) yang menaungi komoditas perkebunan sejak tahun 2000. Perusahaan sawit menjadi mayoritas di tubuh GPPI.

Keinginan bergabung dengan GAPKI muncul dalam beberapa diskusi di Jakarta dan Samarinda. Puncaknya tahun 2006. Mereka sepakat bergabung dengan GAPKI yang telah berdiri sejak 1981 dan berfokus pada komoditas sawit. Tepat 14 September

2006, pengurus GAPKI Kaltim periode 2006-2009 secara resmi dilantik oleh Ketua Umum GAPKI Derom Bangun di Gedung Serba Guna Pemprov Kaltim. H.S. Sjafran dipercaya menjadi ketua yang pertama. Pelantikan ini disaksikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Yunarlis Ngayoh dan para pejabat Pemprov Kaltim lainnya.

Visi dan misi GAPKI Kaltim tentunya sejalan dengan GAPKI Pusat, salah satunya menjadi mitra strategis pemerintah setempat. GAPKI Kaltim punya impian mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan. Karena itu, mendorong anggota melakukan tata kelola industri sawit berkelanjutan menjadi misi selain menjadi mitra strategis pemerintah. "GAPKI Kaltim harus menjadi lokomotif kemajuan ekonomi," kata Muhammadsjah Djafar, Ketua GAPKI Kaltim periode 2015-2019 dan 2019-2024.

Sebagai organisasi, GAPKI Kaltim berkembang positif yang ditandai dengan semakin lengkapnya fungsi dan peran organisasi melalui bidang dan kompartemen. Adanya kompartemen menjadi bukti bahwa penanganan program kerja semakin fokus, tidak hanya sesuai bidang namun juga sub-bidang yang ditangani oleh sebuah kompartemen. Perkembangan asosiasi ini merupakan respon atas

**GAPKI KALTIM****PERIODE 2006-2009****Ketua:** H.S. Sjafran**PERIODE 2009-2012****Ketua:** Azmal Ridwan**PERIODE 2015-2019****Ketua:** Muhammadsjah Djafar**PERIODE 2019-2024****Ketua:** Muhammadsjah Djafar

perkembangan industri sawit di Kalimantan Timur dari tahun ke tahun.

Kontribusi GAPKI Kaltim diwujudkan dalam berbagai kegiatan antara lain di bidang olahraga. Beberapa anggota GAPKI Kaltim menjadi bapak angkat cabang olahraga basket, bisbol, dan softbol untuk kontingan PON XVIII di Riau. Saat ini, anggota GAPKI Kaltim telah mencapai 86 perusahaan dari 367 perusahaan sawit di Kaltim.

"Harapan kami makin banyak perusahaan sawit di Kaltim yang berjuang bersama GAPKI," kata Muhammadsjah Djafar. Semakin banyak anggota yang bergabung, koordinasi dengan pemerintah, termasuk advokasi semakin solid. ■



GAPKI PAPUA

GAPKI Cabang dengan USIA PALING MUDA

Pemerintah Provinsi Papua siap menyambut industri sawit. Lahan seluas 3 juta hektare sudah dialokasikan untuk komoditas sawit.



Bumi Cendrawasih adalah tanah yang subur tempat segala jenis tanaman tumbuh makmur di tanah Papua ini. Meskipun keramahan tanahnya tidak diragukan lagi, namun perkebunan sawit belum menjadi yang utama. Papua memiliki tanah daratan seluas 41,3 juta hektar. Data Kementerian Pertanian menyebutkan hanya ada 29 konsesi kelapa sawit aktif di Papua dengan luas 225 ribu hektar. Potensi daerah ini untuk pengembangan sawit terbuka lebar. Pemerintah juga merencanakan pengembangan sawit di tanah Papua.

Tantangan yang dihadapi komoditas sawit tentu tidak kecil. Kehadiran GAPKI Cabang Papua diharapkan menjadi pendorong laju komoditas andalan ekspor Indonesia ini. GAPKI Papua dibentuk pada 4 Mei 2023. Tulus Sianipar, pengusaha ternama di Papua dipercaya menjadi Ketua GAPKI Papua

yang pertama. Ia didampingi Denny Sanjaya. Di Papua, Tulus Sianipar juga dikenal sebagai Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua.

Pelantikan Pengurus GAPKI Papua periode 2023-2028 dilakukan oleh Ketua Umum GAPKI Eddy Martono di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Yogyakarta pada 14 Juli 2023. "Kehadiran GAPKI Cabang Papua kami berharap peran dan kontribusi komoditas kelapa sawit semakin signifikan untuk masyarakat Papua," kata Eddy Martono. GAPKI Papua memiliki 9 anggota yang mengelola lahan perkebunan sawit seluas 35.341 hektar.

Sembilan perusahaan sawit anggota GAPKI Papua tersebar di lima provinsi baru di Papua. Sejak sebelum GAPKI Papua terbentuk, mereka sudah melakukan berbagai aktivitas sosial yang menyentuh kepentingan masyarakat. Salah satunya

pengembangan peternakan ayam petelur dan perikanan bandeng untuk empat pondok pesantren dan satu sekolah Kristen. Selain pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain terkait dengan kesehatan dan pendidikan.

Kehadiran GAPKI Papua disambut gembira oleh anggota mengingat tantangan yang dihadapi tidak kecil. "Ini tantangan. Dengan kehadiran GAPKI Papua kami tidak lagi berjuang sendiri," kata Luwy Leunufna dari Tunas Sawa Erma Group. Dia meyakini industri sawit membantu meningkatkan ekonomi Papua dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Pemerintah Provinsi Papua siap menyambut industri sawit. Lahan seluas 3 juta hektare sudah dialokasikan untuk komoditas sawit. Dinas Perkebunan Papua menyatakan lahan yang disiapkan layak untuk komoditas sawit. Termasuk untuk pengembangan pabrik kelapa sawit. ■



GAPKI ACEH

Bersinergi Mengembangkan SOLIDITAS ORGANISASI

*Aceh merupakan pioner perkebunan sawit komersial
di Indonesia bersama Sumatera Utara*

Tanaman kelapa sawit sudah lebih dari satu abad tumbuh dan berkembang di daratan Aceh. Bahkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama di Indonesia berdiri di provinsi ini pada 1911. Tepatnya di Sei Liput atau Sungai Liput, salah satu kampung di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika PKS ini berdiri, kebun sawit di Aceh sudah mencapai 2.100 hektar yang dikelola oleh 19 perusahaan di Aceh Tamiang. Perkembangan komoditas sawit cukup positif. Satu dekade kemudian, tahun 1922, luas kebun sawit sudah 6.916 hektar.

Meskipun Aceh menjadi pioner perkebunan sawit komersial di Indonesia bersama Sumatera Utara, tapi kehadiran GAPKI Cabang Aceh termasuk baru. Sampai tahun 2023, GAPKI Aceh baru menggelar musyawarah cabang tiga kali sejak 2014. Tokoh komoditas sawit Aceh, Sabri Basyah dipercaya menjadi Ketua GAPKI Aceh yang pertama dan dilanjutkan dengan periode yang kedua. Sejak 2023, kepemimpinan GAPKI Aceh di tangan Denny Ramadhan Nasution.

Pengembangan industri sawit

menjadi pekerjaan besar GAPKI Aceh. Komoditas ini menjadi sandaran hidup sebagian besar penduduk di beberapa wilayah sejak lama. Di Kabupaten Singkil, sektor sawit adalah pekerjaan utama lebih dari 70% penduduk Singkil. Begitu juga di beberapa kawasan lain di Aceh. Tidak heran kalau sawit terus berkembang. Sampai tahun 2022, luas kebun sawit di Serambi Makah ini sudah 540 ribu hektar. Dari jumlah itu, 52% lebih merupakan kebun rakyat.

Secara nasional, luas perkebunan sawit di Aceh berada di urutan ke-8. Pemerintah Provinsi Aceh mengajak GAPKI Aceh berpacu mengembangkan komoditas sawit. "Ini tanggung jawab kita bersama," kata Sabri Basyah. Bagi daerah pioner komoditas sawit, kondisi saat ini ibarat ketertinggalan yang harus dikejar. GAPKI Aceh mengusulkan penyusunan roadmap industri sawit Aceh bersama IDH Sustainable Trade Initiative, sebuah NGO dari Negeri Belanda lewat program menuju kelapa sawit berkelanjutan.

GAPKI Aceh juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi/kabupaten mengembangkan program sawit berkelanjutan. Partisipasi



GAPKI ACEH

PERIODE 2014-2017

Ketua: Sabri Basyah

PERIODE 2017-2023

Ketua: Sabri Basyah

PERIODE 2013-2017

Ketua: Denny Ramadhan Nasution

masyarakat ditingkatkan karena komoditas sawit tidak bisa dilepaskan dari keseharian masyarakat di Aceh. "Dukungan semua pihak sangat berarti bagi kami," kata Denny Ramadhan saat pelantikan pengurus GAPKI Aceh periode 2023-2028 di Banda Aceh, pada 28 Februari 2023. Jumlah anggota GAPKI Aceh sebanyak 45 perusahaan sawit.

Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak diyakini akan mengembalikan kejayaan Aceh sebagai pioner perkebunan sawit komersial di Indonesia. ■



GAPKI Mengucapkan Selamat Tahun Baru

2 0 2 4

